

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BUO KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Oleh
Ofandres Taluke¹

Juliana Lumintang²

Juliana Tumiwa³

ABSTRACT

Be an integral part of rural development, national development of the means, hence a broad-based approach to development villages could not have been on the talk in full that requires multi dimensional sectoral approach and multi to refute the to be obtained a whole description from a variety of factors that affect its implementation and an effect its consequences in the development of other sectors. So that the development runs on a continuous basis and being the force which bubbling through our society itself, so it takes a lot especially with regard to the establishment of a village community efforts to get to participate directly in village of various development activities.

In village development there should have been the development monitoring is part of the participation of the community. Supervision is not solely the task of the government only, but also the responsibility of society itself, thereby avoiding several biases to the development of the that existed in the village.

One of the matters in the process of the village administration is how build or government created a mechanism that can develop its mission in realizing prosperous society in purpose of creating .The government has to make the construction is based on community aspirations, and provide public services in the most of it.

Although there is still barriers small in development and directing the participation of the Buo village, and in fact overall it can be said that the public participation the village has quite inadequate in implementing the project village or rural development.

Keywords: development, participation, implementation

¹ Mahasiswa Sosiologi Fispol Unsrat

² Pembimbing Skripsi I

³ Pembimbing Skripsi II

PENDAHULUAN

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral, dari sarana pembangunan nasional, oleh karena itu pendekatan pembangunan desa tidak dapat dibicarakan secara parsial yang memerlukan pendekatan multi dimensional dan multi sektoral agar dengan demikian akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dari berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya sekaligus akibat yang ditimbulkannya terhadap pembangunan disektor lainnya. Agar proses pembangunan berjalan secara terus menerus dan menjadi kekuatan yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri, maka dibutuhkan banyak pembinaan khususnya yang berkaitan dengan upaya masyarakat desa untuk dapat berpartisipasi secara langsung dalam berbagai kegiatan pembangunan Desa.

Pembangunan desa sangat memerlukan adanya partisipasi dari para pemimpin di desa serta seluruh masyarakat desa. Hal ini berarti bahwa sasaran pembangunan justru mendorong partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat untuk mengelola dengan segala kemampuan dari semua potensi yang ada di desa. Partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang mutlak harus ada, demi tercapainya proses pembangunan desa. Oleh karena itu usaha-usaha untuk membangkitkan partisipasi perlu dikembangkan, sehingga tanggung jawab pembangunan desa akan dapat dirasakan oleh masyarakat, karena masyarakat benar-benar terlibat dan turut berperan serta di dalamnya. Selanjutnya berhasilnya pembangunan desa bukan saja di tentukan oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang di turunkan dari tingkat atas, tetapi pembangunan desa memerlukan imbang kewajiban yang serasi antara pemerintah di satu pihak dan masyarakat desa di lain pihak. Hal ini sesuai dengan apa yang di tegaskan di dalam kebijaksanaan dalam pembangunan desa itu mengutamakan keseimbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah di satu pihak untuk memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan fasilitas serta masyarakat memberikan partisipasi dalam pembangunan yang berbentuk prakarsa dan swadaya gotong-royong pada setiap program pembangunan yang di inginkan.

Dari kondisi obyektif di Maluku Utara dan secara khusus di desa Buo kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat bahwa partisipasi

masyarakat desa belum dapat di bangkitkan secara nyata sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan Desa. Hal ini dapat di lihat dari bentuk partisipasi yang di berikan oleh masyarakat secara umum adalah partisipasi dalam bentuk tenaga. Pada hal dalam pelaksanaan pembangunan desa banyak dibutuhkan adanya berbagai bentuk partisipasi seperti partisipasi dalam proses pembangunan, terutama partisipasi dalam memberikan ide-ide, buah pikiran, yang menjadi prasyarat nyata bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Diduga bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam mekanisme pembangunan desa dapat dilakukan belum dominan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu melalui program pembangunan desa, tercermin dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong yang berasal dari masyarakat desa itu sendiri sesuai dengan apa yang disepakati bersama melalui musyawarah desa. Dalam pembangunan desa perlu adanya pengawasan pembangunan yang merupakan bagian dari partisipasi masyarakat. Pengawasan bukanlah semata-mata tugas dari pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat itu sendiri, sehingga dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan terhadap pembangunan yang ada di desa.

Pengertian Partisipasi

Partisipasi oleh banyak kalangan disamakan pengertiannya dengan keikutsertaan, turut serta mengambil bagian. Hal ini menunjukkan adanya unsure keterlibatan dari dalam suatu kegiatan. Secara Etimologi kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu participation ialah kata benda orang ikut mengambil bagian, peserta, TO Participate adalah kata kerja, ikut mengambil bagian, "participation" adalah hal mengambil bagian". (Wojowasito W.J.S. Poerwadarminto : 243)

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam partisipasi itu terkandung adanya keterlibatan diri dari seseorang atau kelompok orang dalam suatu kegiatan. Pernyataan ini kemudian di dukung oleh defenisi yang dikemukakan oleh The Liang Gie Bahwa : Participation adalah peserta, setiap orang yang turut serta dalam suatu kegiatan, participation adalah pengikut sertaan suatu aktifitas untuk membangkitkan persamaan serta dalam kegiatan organisasi, turut dalam serta dalam organisasi". (The Liang Gie:103)

Participation adalah hal ikut sertanya setiap orang suatu kegiatan Merupakan aktivitas dalam organisasinya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Bila kita hubungkan dengan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Masyarakat dalam kedudukannya sebagai subyek pembangunan dituntut dalam memberikan sumbangan terhadap apa yang dibutuhkan dalam pembangunan. Kesiediaan memberikan sumbangan ini bukan lahir begitu saja, akan tetapi terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu yang dicapai. Disamping juga adanya upaya-upaya yang kita lakukan oleh pemerintah dalam membangkitkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan adalah fungsi pemerintah, sebagaimana dijelaskan oleh S.P Siagaan bahwa : Penggerak adalah merupakan keseluruhan dari proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien seta ekonomis.

Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara. Penyusunan perencanaan partisipatif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala, dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas (acceptable) dan dianggap layak dipercaya (reliable) untuk dapat dilaksanakan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan

keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan terwujud secara optimal pula. Perencanaan program pembangunan disusun sendiri oleh masyarakat, maka selanjutnya implementasinya agar masyarakat juga secara langsung dilibatkan. Perlibatan masyarakat, tenaga kerja lokal, demikian pula kontraktor lokal yang memenuhi syarat. Selanjutnya untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, peran serta masyarakat dalam pengawasan selayaknya dilibatkan secara nyata, sehingga benar-benar partisipasi masyarakat dilibatkan peran serta mulai penyusunan program, implementasi program sampai kepada pengawasan, dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

Pengertian Masyarakat

Kata masyarakat dalam bahasa Inggris di Identikkan dengan Society (Latin) "Society" yang berarti kawan. Pengertian ini ternyata sesuai dengan kenyataan bahwa Masyarakat itu tidak daripada sekelompok manusia yang saling berhubungan dan bergaul. Berkaitan dengan pengertian tersebut Ralph Lington Kemudian menjelaskan sebagai berikut : "Masyarakat adalah merupakan kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah di tentukan." (Ibid : 29).

Berdasarkan pengertian ini maka dapat dipahami bahwa untuk dapat dikatakan sebagai masyarakat maka harus merupakan kelompok manusia yang telah bermukim dan bekerja sama dalam suatu wilayah (tempat) tertentu. Lebih lanjut kemudian dijelaskan oleh Koentjaraningrat bahwa : "Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berintegrasi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terkait oleh suatu identitas bersama." (M. Cholil Mansyur, 1989;21-22).

Selanjutnya M. Cholil Mansyur memberikan batasan sebagai berikut : "Masyarakat adalah pergaulan hidup yang akrab antara manusia, dipersekutukan dengan cara-cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan merdeka." Defenisi menunjukkan bahwa dalam hidup bermasyarakat manusia selalu diatur oleh adanya cara-cara tertentu yang merupakan aturan. Manusia dalam kehidupannya selalu membutuhkan

manusia lain, karena tidak semua kebutuhan hidupnya dapat dipenuhi sendiri begitupun sebaliknya pada orang lain. Saling ketergantungan ini menimbulkan interaksi sosial.

Interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat diketahui melalui adanya kontak sosial (Social Contact) dan komunikasi yang terjadi di antara masyarakat. Adanya kontak sosial dan komunikasi itu sehingga masyarakat selalu kelihatan hidup penuh dengan kebersamaan.

Pada hakekatnya kehidupan sosial itu sendiri dari aksi-aksi reaksi yang terbilang banyak, baik antara perorangan maupun antara kelompok, pihak-pihak yang terlibat menyesuaikan diri dengan salah satu polaperilaku yang kolektif. Kesatuan yang berasal dari penyesuaian itu kita sebut kelompok atau masyarakat, misalnya Negara akan merupakan suatu kesatuan objektif pada warganya dijalankan satu dengan yang lain oleh pengakuan, ikatan dan perasaan yang sama juga. Dengan kata lain masyarakat merupakan suatu proses dinamis yang di tentukan oleh apa yang di lakukan anggotanya, suatu kejadian yang berlangsung terus selama mereka masih bersedia memberi dukungan aktif kepada itu. Seandainya suatu masyarakat membubarkan semua struktur sosialnya dan tiap-tiap anggota mulai memakai isyaratnya sendiri mencari jalannya sendiri, membuat peraturannya sendiri sehingga pada akhirnya tidak tinggal bersama.

Dengan bertolak dari pengertian itu, Sinirnel tidak memakai istilah masyarakat yang bernada terlalu statis dan realistik, tetapi memilih istilah "vergesellschaftung" (hidup) bermasyarakat yang dinamis yang mengungkapkan tekad dan tindakan manusia untuk berkelompok, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Cooley (dalam K.J Veeger, 1990) mendefenisikan "masyarakat sebagai suatu cohemnce of mind yaitu suatu kebersamaan dan kebersatuan antara banyak alam pikiran yang pada dasarnya searah atau hidup, dalam berbagai hal di bidang spiritual. Masyarakat dengan nilai-nilai budaya, perasaan, keyakinan dan struktur-strukturnya ada di dalam kepala para anggotanya. Walaupun manusia dipisahkan dari orang lain oleh tubuhnya namun oleh pikirannya ia bersatu dengan mereka. Boleh jadi bahwa pikiran sekarang diwarnai oleh individualitasnya dan menunjukkan suatu kombinasi dan intensitas yang

istimewanya tetapi variasi itu tidak dapat dibenarkan oleh kesimpulan, bahwa ia tidak mengambil bagian dalam suatu hidup spiritual bersama. Justru kesamaan dengan orang lain memberikan kemungkinan bahwa ia mengenal mereka, memahami maksud mereka dan dapat bekerja sama dengan mereka.”

J. L. Gillian, (1986), mendefenisikan bahwa “masyarakat yaitu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut system adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa indentitas bersama”.

Apabila anggota-anggota suatu kelompok baik kelompok besar maupun kecil hidup bersama. Sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tadi tersebut masyarakat, sebagai suatu perumpamaan maka kebutuhan-kebutuhan sekarang tidak mungkin secara keseluruhan terpenuhi apabila dia hidup bersama. Dengan lainnya yang sesuku. Dalam pada itu kriteriayang utama bagi adanya suatu masyarakat setempat adalah adanya hubungan sosial antara anggota-anggota suatu kelompok. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat setempat merupakan suatu bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (dalam arti geografis), dengan batas-batas tertentu dimana faktor utama yang menjadi unsur pertama adalah interaksi yang lebih besar di antara anggota-anggotanya dibandingkan dengan interaksi mereka dengan penduduk di luar wilayah.” Jadi, dapat disimpulkan secara singkat bahwa masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial tertentu. Dasar-dasar dari pada masyarakat setempat adalah loyalitas dan perasaan solidaritas masyarakat setempat tersebut.

Masyarakat pedesaan dan perkotaan bukanlah dua komunitas yang terpisah sama sekali satu sama lain. Bahkan dalam keadaan yang wajar diantara keduanya terdapat hubungan yang erat, bersifat ketergantungan, karena diantara mereka saling membutuhkan. Kota tergantung pada desa dalam memenuhi kebutuhan warganya akan bahan-bahan pangan seperti beras, sayur mayor, daging, ikan. Desa juga merupakan sumber tenaga kasar bagi jenis-jenis pekerjaan tertentu di kota misalnya saja buruh bangunan dalam proyek-proyek perumahan, proyek pembangunan atau perbaikan jalan raya atau jembatan. Mereka biasanya adalah pekerja-

pekerja musiman. Sebaliknya, kota menghasilkan barang-barang yang juga diperlukan oleh orang desa seperti bahan-bahan pakaian, alat dan obat pembasmi hama pertanian, minyak tanah, obat-obatan untuk memelihara kesehatan dan transportasi. Dalam kenyataannya hal ideal tersebut kadang-kadang tidak terwujud karena adanya beberapa pembatas. Jumlah penduduk semakin meningkat, tidak terkecuali di pedesaan. Padahal luas lahan pertanian dan tanah sulit bertambah, terutama di daerah yang sudah lama berkembang seperti pulau Jawa. Peningkatan jumlah penduduk tanpa diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja ini pada akhirnya berakibat bahwa di pedesaan terdapat banyak orang yang tidak mempunyai mata pencaharian tetap. Mereka merupakan pengangguran, baik sebagai pengangguran penuh maupun setengah penuh.

Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu Negara.

Sondang P. Siagian, (1981 : 21) mendefinisikan pembangunan adalah : Suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintahan dalam usaha pembinaan bangsa.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam konsep pembangunan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yakni : Harus ada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahnya, dilaksanakan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai. Dari beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan tersebut, bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam suasana kehidupan yang penuh harmonis. Dalam pembangunan, peran serta seluruh lapisan masyarakat selaku pelaku pembangunan dan pemerintah selaku pengayom, Pembina dan pengarah sangat diperlukan. Antara masyarakat dan pemerintah harus berjalan seiring, saling mengisi, melengkapi dalam satu kesatuan gerak

pembangunan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pembangunan harus menyangkut semua pihak yaitu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, pembangunan yang pertama harus di bina dan dikembangkan adalah pembangunan desa. Perkataan "desa" menurut Suhardjo Kartohadikusoemo dan Hatta Sastra Mihardja, (1987 : Modul 2.2) adalah berasal dari perkataan "Sanskrit" yang artinya tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran.

Berkenaan dengan pembangunan desa, Daeng Sudirwo, (1981 : 63) mendefinisikan pembangunan desa sebagai berikut : Pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual berdasarkan pancasila yang berlangsung di desa. Dengan demikian, maka pembangunan desa perlu terus diupayakan karena secara keseluruhan desa merupakan landasan bagi ketahanan nasional seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, untuk mencapai tujuan dari pembangunan desa itu, pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek kehidupan baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama maupun dalam aspek pertahanan dan keamanan. Melalui pembangunan desa diupayakan agar masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan.

Pembangunan desa pada intinya bukanlah semata-mata bentuk usaha pembangunan fisik saja tetapi pada hakekatnya merupakan sikap dan sistem kerja baru untuk membina suatu masyarakat. Pembangunan desa pada eksistensinya merupakan keseluruhan yang merupakan suatu revolusi desa secara keseluruhan yang di dalamnya berlangsung dengan cepat dan teratur serta berencana. Sehubungan dengan konsep tersebut di atas maka surjadi (1983) mengambil batasan tentang pembangunan desa adalah proses dimana masyarakat mengadaptasi dirinya kepada perubahan dan badan yang bergerak dibidang pembangunan desa itu adalah organisasi luar yang mencoba menolong proses itu dan mempercepatnya. Dari uraian diatas dapat difahami bahwa badan yang bergerak dibidang pembangunan dan atau petugas pembangunan memiliki tugas utama untuk menolong masyarakat mempercepat proses

perubahan yang terjadi di masyarakat. Perubahan disini dimaksud adalah menuju perbaikan dengan kata lain adalah pembangunan. Sedangkan Departement dalam negeri (1975) merumuskan bahwa pembangunan desa adalah suatu metode untuk menyelenggarakan usaha-usaha yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh penduduk secara langsung, umum, relative, merata dan mengikat yang dalam prosesnya masyarakat setempat berkedudukan sebagai subjek pembangunan dan pemerintah memberikan pengarahannya, koordinasi, pengendalian, pengawasan dan penggairahan. Pembangunan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, mempunyai arti yang strategis serta mempunyai makna yang lebih hakiki bagi rakyat Indonesia, karena pembangunan desa harus menyatuh segenap lapisan masyarakat yang menyebar luas keseluruh pedesaan ditanah air kita. Disamping itu pembangunan desa pada hakekatnya adalah pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu serta merupakan suatu pembangunan yang berkelanjutan dan yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat. Dengan mendasarkan bahwa pembangunan desa merupakan juga suatu gerakan dan bahwa taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya ditentukan oleh swakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat sehingga partisiasinya dalam pembangunan dirasakan suatu kewajiban.

Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai proses, sebagai metode, sebagai program maupun sebagai gerakan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sebagai suatu proses

Pembangunan desa sebagai suatu proses memperhatikan jumlahnya proses perubahan maupun yang berlangsung dengan cara yang lebih maju. Sebagai suatu proses maka pembangunan desa lebih menekankan kepada aspek perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut segi social maupun segi psikologis.

2. Sebagai suatu metode

Disini tercakup pengertian bahwa pembangunan desa akan mengusahakan agar rakyat atau masyarakat desa berkemampuan membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan dan sumber-

sumber yang dimiliki usaha-usaha tersebut akan ditekankan kepada sasaran yang ingin dicapai yaitu perbaikan taraf hidup, maka pokok perhatiannya disini ditunjukkan kepada bidang-bidang dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti pendidikan, keehatan, pertanian, industri, rumah tangga, koperasi, pelestarian lingkungan perbaikan kampung dan lain sebagainya.

Pada akhirnya pembanguann desa merupakan suatu gerakan karena pada hakekatnya semua usaha dan kegiatan pembangunan diarahkan kedesa-desa dan hampir semua pembangunan pada dasarnya menangani juga pembangunan pedesaan. Sebagai suatu gerakan maka pembangunan desa mengusahakan memajukan masyarakat sesuai dengan cita-cita nasional Bangsa Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pengertian Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai " a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town ". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasiona dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa : Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis,

sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.

Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1,7 Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan atauoun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipai, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usus dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggara), atau yang dikenal selama ini sebagai "Pemerintahan ". Kepala adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan dan lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan (Paraturan).

Pembahasan Hasil Penelitian

Pada prinsipnya pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat desa sematamata hanyalah untuk masyarakat desa itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat desa. Dengan demikian maka dalam proses pembangunan desa itu dibutuhkan partisipasi masyarakat desa itu sendiri yang dipergunakan untuk masyarakat umum atau lebih khususnya masyarakat Desa Buo. Senada dengan hal tersbut bahwa sesuai dengan hasil wawancara dengan informan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Buo, dapat dilihat dari jawaban informan yang hampir sepenuhnya mengatakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Buo kurang maksimal.

1. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat.

Partisipasi adalah kesukarelaan masyarakat tanpa adanya unsur paksaan, partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam bentuk

tenaga, materi, pemberian ide dan saran. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu elemen yang krusial dan mutlak diperlukan dalam rangka pembangunan, terlebih jika dikaitkan dengan pergeseran paradigmapembangunan yang kini telah menempatkan manusia dan masyarakat sebagai sentral dalam pembangunan yang tidak hanya memandang masyarakat sebagai objek yang dibangun tetapi sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri. (Wawancara H.T)

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat sebagian baru pada partisipasi tenaga, hal ini berkaitan dengan tingkat pendidikan. Bila dilihat dari tingkat pendidikan formal maka sebagian besar masyarakat masih memiliki latar belakang pendidikan yakni tamat SLTP. Dalam partisipasi akan tumbuh secara nyata kalau masyarakatnya memiliki kesadaran yang tinggi. Salah satu bentuk partisipasi dalam proses pembangunan yang merupakan wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat adalah sikap mendukung terhadap proses pembangunan antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif atau tenaga. Sebagaimana diketahui bahwa dalam suatu masyarakat tidak semua masyarakat berpartisipasi secara penuh, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan, perbedaan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Partisipasi tenaga yang dimaksudkan disini adalah bagaimana masyarakat terlibat secara langsung atau fisik dalam pelaksanaan pembangunan. (Wawancara M.T)

Bentuk partisipasi dalam pembangunan yang lebih dominan berupa kerja bakti, membersihkan selokan air, membuat jalan setapak, membangun gedung ibadah. Bentuk partisipasi seperti ini dinamakan partisipasi tenaga, sedangkan bentuk partisipasi lain berupa pemberian dalam bentuk materi seperti bahan-bahan bangunan yang disumbangkan untuk gereja, ataupun pembuatan jalan bagi mereka yang berkelebihan. Dan lainnya adalah membantu memberikan bantuan berupa bambu dan sebagainya, memberikan kue bagi mereka yang kerja bakti dan bentuk partisipasi materi lainnya. Sedangkan bentuk partisipasi yang lebih tinggi berupa ide-ide, buah pikiran maupun gagasan akan tumbuh secara nyata apabila terdapat pada masyarakat yang sudah lebih kritis. (Wawancara Y.T)

Bentuk partisipasi berupa tenaga seperti kerja bakti lazim dilakukan karena partisipasi ini lebih dominan dan selalu dilakukan oleh pemerintah

desa. Partisipasi ini dilaksanakan dengan himbauan kepala desa untuk berkumpul dan diinformasikan oleh ketua RT dan dilakukan dengan pengerahan masa. Jadi partisipasi seperti ini juga dikenal dengan memobilisasi masyarakat desa untuk diikutsertakan dalam bentuk kerja bakti secara massal namun tidak setiap hari tetapi waktu-waktu tertentu. (Wawancara S.A)

Partisipasi dalam bentuk tenaga merupakan partisipasi yang umum dilakukan oleh masyarakat desa terutama ikut sertanya dalam bentuk kerja bakti. Namun dari pantauan saya di lapangan memang menunjukkan bahwa bentuk partisipasi seperti ini perlu digerakan kalau ditingkatkan pendidikannya. Jadi latar belakang juga ikut mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan desa akan berhasil apabila didukung dengan latar pendidikan yang memadai. Rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat membuat partisipasinya terhadap pembangunan dalam suatu komunitas tertentu masih sangat belum memadai, dalam keadaan kurang atau miskin, masyarakat sulit mengambil keputusan mana yang harus dilakukan antara kepentingan perut atau kepentingan bersama yang mungkin boleh jadi akan membawa manfaat yang lebih besar. Jika masyarakat semakin terdesak dengan kebutuhan perutnya, pada saat masyarakat akan mengelak dari gotong royong atau kerja bakti bahkan cenderung apatis dengan keadaan lingkungan. Dalam keadaan seperti ini, maka akan sulit mengharapkan partisipasinya. (Wawancara S.A)

Partisipasi dalam bentuk materi (barang). Tidak semuanya masyarakat menyumbang dalam bentuk uang tetapi ada juga masyarakat yang berpartisipasi dalam bentuk materi, bahkan ada masyarakat yang menyumbangkan kedua-duanya (uang atau materi). Hal ini didasari karena adanya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya. Sumbangan materi biasanya dilakukan secara langsung dimana sumbangan materi tersebut diperuntukkan untuk pembangunan yang bersifat fisik seperti pembangunan gereja, jembatan, perbaikan jalanan dan sarana-sarana umum lainnya. (Wawancara Y.B)

Partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan

program dan juga mewujudkan dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Partisipasi dapat diwujudkan pada berbagai macam kesempatan, seperti melalui pertemuan, rapat, saran dan tanggapan proses pembangunan. Penyaluran ide-ide dan sumbangan pemikirannya dapat disalurkan lewat lembaga-lembaga formal yang ada. (Wawancara M.T)

Partisipasi dalam bentuk uang untuk kegiatan pembangunan terutama dalam hal pembangunan fisik, dan masyarakat dalam memberikan sumbangan bukan karena adanya paksaan dari pemerintah atau dari pihak lain tetapi karena adanya kesadaran untuk membangun daerahnya. Jadi partisipasi yang diberikan masyarakat dalam bentuk uang tergantung dari pendapatan masyarakat itu sendiri. (Wawancara Y.S)

Partisipasi dalam bentuk ide, gagasan atau buah pikiran, dimana masyarakat terlibat atau ikut serta dengan menyumbangkan ide, gagasan atau pemikiran dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bersama serta untuk kebaikan bersama. Partisipasi dalam bentuk buah pikiran, seperti menyampaikan saran atau menyampaikan masukan kepada pihak pemerintah baik dengan cara lisan maupun tulisan dan disampaikan dengan cara bahasa yang santun dan bersifat membangun. (Wawancara C.K)

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat.

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan tidak hanya merupakan usaha pemerintah semata atau masyarakat saja, akan tetapi suatu kegiatan bersama yang hasilnya diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan pembangunan Desa merupakan cermin dari keberhasilan pembangunan nasional, karena itu titik berat pembangunan nasional diletakkan pada pembangunan Desa.

Apabila pembangunan tersebut dilaksanakan diwilayah Desa, maka sudah jelas bahwa partisipasi masyarakat Desalah yang menjadi kunci keberhasilannya. Namun demikian peran serta masyarakat dalam proses pembangunan tentunya banyak faktor yang mempengaruhi tingkat

keterlibatannya dalam pembangunan, menurut hemat penulis faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa Buo adalah faktor intern yang meliputi kesadaran, pendidikan dan penghasilan / pendapatan. Sedangkan faktor ekstern meliputi kepemimpinan pemerintah dan peralatan / fasilitas.

Faktor Intern yang meliputi

a. Faktor Kesadaran / Kemauan

Keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena adanya yang mendorongnya untuk partisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri.

Apabila warga masyarakat sudah sadar mengenai arti pentingnya pembangunan itu, maka jelas mereka juga akan lebih banyak melibatkan diri didalamnya. Hal ini dimaksudkan agar apa yang menjadi cita-cita pembangunan dapat tercapai yakni memberikan hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat, demikian pula halnya dengan warga masyarakat Desa Buo yang merupakan lokasi penelitian ini.

b. Faktor Pendidikan

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan di muka bumi ini adalah karena faktor pendidikan. Jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat pembangunan, maka kenyataan menunjukkan adanya hubungan yang erat. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan, baik pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun yang merupakan swadaya masyarakat. Melalui pendidikan yang tinggi itulah kemudian mereka mengerti tentang arti pentingnya pembangunan yang dilaksanakan dan mereka pada umumnya merasa senang terlibat dalam pembangunan tersebut, akan tetapi sebaliknya jika masyarakat mempunyai pendidikan yang rendah, maka mereka sulit untuk mengerti apa dan bagaimana pentingnya pembangunan yang dilaksanakan itu. Karena ketidaktahuan itulah kemudian timbul sikap yang acuh dan bermasa bodoh terhadap pembangunan.

c. Penghasilan atau Pendapatan

Setelah mengetahui bahwa faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka berikut ini akan diterangkan pula bagaimana pengaruh penghasilan atau pendapatan dalam pembangunan, khususnya dalam bentuk sumbangan uang atau dana. Berdasarkan penghasilan masyarakat dikecamatan Bontomatene yang berbeda-beda, maka sangat memungkinkan pula partisipasinya dalam pembangunan berbeda-beda. Samping penghasilan atau pendapatannya yang tidak sama juga tingkat kesibukannya (waktu/kerja) berbeda-beda pula. Semua itu dapat mengurangi partisipasinya dalam pembangunan. Hal tersebut adalah merupakan pantauan penulis selama melakukan penelitian yang ditegaskan oleh beberapa responden yang diinterview secara langsung. Tingkat penghasilan masyarakat dengan tingkat partisipasi dalam bentuk uang (dana) dalam pembangunan. Responden yang berpenghasilan rendah ada yang memberikan jawaban jarang dan tidak pernah berpartisipasi, sedangkan yang memberikan jawaban sangat sering dan sering tidak ada, ini berarti bahwa responden yang berpenghasilan rendah sangat sulit melibatkan diri berpartisipasi dalam bentuk uang.

Faktor Ekstern yang meliputi :

a. Kepemimpinan Pemerintah

Telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa partisipasi masyarakat dan pembangunan di Desa Buo pada khususnya tidak timbul begitu saja melainkan terpengaruh oleh beberapa faktor dan salah satunya adalah kepemimpinan pemerintah setempat.

Karena masyarakat adalah merupakan paduan dari beberapa individu yang mempunyai sifat atau karakter yang berbeda-beda, maka untuk memadukannya diperlukan suatu kekuatan yakni kemampuan pendinamisan oleh pimpinan pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah desa. Kepemimpinan yang baik dan mampu menyatu dengan karakter masyarakat yang dipimpin dalam membina dan mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Tetapi akan terjadi sebaliknya

jika kepemimpinan yang diterapkan oleh pemerintah bertentangan dengan sifat dan karakter dari masyarakat yang dipimpinnya.

b. Peralatan / Fasilitas

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkatnya, dibutuhkan kantor Desa yang merupakan tempat untuk melaksanakan tugas pengelolaan, pelaporan, pencatatan dan berbagai kegiatan lainnya. Kantor Desa sebagai pusat kegiatan pemerintah Desa merupakan sarana yang sangat penting bagi kepala Desa dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai seorang pemimpin harus dapat memberikan teladan yang baik sehingga dapat tercipta berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat di Desa Buo.

Perlengkapan kantor Desa adalah semua peralatan untuk menjamin kelancaran seluruh kegiatan pemerintah. Secara keseluruhan pada lokasi penelitian perlengkapan di kantor Desa sudah memadai. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah, khususnya pada upaya peningkatan pelayanan administrative kepada masyarakat. Oleh skarena itu menurut penulis, peralatan atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepala Desa dan aparatnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kesimpulan

Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengembang misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya

- a. Dalam pembangunan desa tidak dapat berjalan dengan baik atau tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh satu komponen saja. Artinya, dalam pembangunan desa bukan hanya menjadi tanggung jawab atau kewajiban pemerintah desa semata, tetapi juga menuntut keterlibatan atau partisipasi masyarakat.
- b. Partisipasi dalam pembangunan sangat penting, secara umum partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan

kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan bersama.

- c. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga dibutuhkan untuk mengembangkan sinergi dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat maupun sinergi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.
- d. Setiap pembangunan desa harus melibatkan masyarakat mulai dari proses pembangunan program pembangunan sampai dengan evaluasi, sebab yang harus menerima manfaat dari setiap pembangunan di Desa adalah semua masyarakat.

Meskipun masih terdapat hambatan-hambatan kecil dalam pembangunan dan mengarahkan partisipasi masyarakat Desa Buo, namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa tersebut telah cukup memadai dalam rangka pelaksanaan proyek desa atau pembangunan pedesaan. Kepala Desa Buo beserta aparatnya cukup baik dan berhasil menjalankan fungsi dan perannya dalam mendorong dan mengarahkan partisipasi masyarakat sehingga cukup berhasil dalam menyelesaikan salah satu proyek infrastruktur yaitu pembangunan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Beratha.I.Aliyuman. 1992. Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bintoro, dkk. 1988. Kebijakan Dan Pembangunan. Jakarta. Intermedia.
- Davis. 1990. Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan. Semarang: Gramedia
- Djunaedi. 1995. Pembangunan di Pedesaan. Jakarta.Universitas Indonesia Press
- Gillin. 2000. Masyarakat Desa dan Kota. Jakarta. Gunung Mulia.
- Janssen. P. 1993. Teknik- Teknik Pembangunan Masyarakat, Institut Pembangunan Masyarakat. Malang:BPA
- Moleong. 2003. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Slamet, Y. 1994. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi, Sebelas Maret University Press, Surakarta
- Ndraha, Taliziduhu, 1983, Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan di Beberapa Desa, Jakarta, Yayasan Karya Dharma, IIP Jakarta.
- Ndraha, T. 1990. Pembangunan Masyarakat. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ndraha T. 1990. Membangun Masyarakat Mempersiapkan Tinggal Landas, Jakarta: Rineka Cipta.
- Robert, Charles. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. Bina Aksara
- Siagian H Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung 1989.
- Rongers. 1991. Pembangunan Desa. Malang:Rineka Cipta
- Sajogyo, Pujuwati. 1981. Sosiologi Pedesaan. Yoyakarta: Gaja Mada University Perss
- Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Disertai Penjelasannya.
- Long, Norman, Sosiologi Pembangunan Pedesaan, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Mubyarto dan Kartono, Sartono, Pembangunan Pedesaan di Indonesia, Liberty Yogyakarta, 1998.
- Sutarto. 1980. Partisipasi Masyarakat Desa. Jakarta: Bina Aksara.
- Soetrisno L. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta.
- Theresia Aprilia et al. 2014 Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Rahim (Schramm dan Lerner, 1976) Pengertian Pembangunan Sebejo dan Supriyanto, 2005. Kerangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Menuju Pembangunan Yang Berkelanjutan.
- Kansil, C.S.T (1983). Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pembangunan Desa. Jakarta. Ghalia Nasional
- Suswo Pangritno, N. Soehartono dan Supriyadi. (1987). Pokok-Pokok Sosiologi Desa. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa.